

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu usaha yang mempunyai peran penting dalam perekonomian setiap negara termasuk Indonesia. Secara kasar, lebih dari 95% bisnis di dunia ini adalah UMKM dan mereka mampu menyerap 65% tenaga kerja (Kotelnikov, 2007). Menurut Rosenfeld (2002), pembangunan usaha kecil merupakan penggerak pembangunan nasional. Pengembangan UKM diupayakan agar dapat menjangkau dan merata sampai di daerah pedesaan.

UKM merupakan penopang perekonomian bangsa, UMKM ini tidak hanya berkontribusi dalam jumlah tetapi juga berkontribusi dalam penyedia lapangan pekerjaan. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2013,

lebih dari 99% usaha di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan mereka mampu menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Selain itu, UMKM memberikan sumbangan besar lebih dari 57% kepada Produk Domestik Bruto (PDB) atau 1.537 triliun. Hal ini tentu merupakan suatu bukti bahwa UMKM di Indonesia memainkan peranan yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia.

Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99 % dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia, UMKM masih

menjadi tulang punggung perekonomian karena tahan terhadap krisis dan lebih dinamis dari perusahaan besar. Di Indonesia sendiri UMKM berhasil memainkan perannya sebagai pengaman perekonomian nasional pada masa krisis serta menjadi dinamisor pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis. Hal ini dikarenakan mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. Sehingga, ketika ada fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi mengalami imbas krisis.

Dari uraian tersebut terlihat bagaimana pentingnya UMKM sebagai pilar dalam perekonomian Indonesia, mulai dari penyerapan tenaga kerja, pembentukan PDB, pendistribusian hasil-hasil pembangunan maupun sebagai pengaman dan dinamisor perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis dan gejolak ekonomi global.

Dari besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional tentu akan, berpotensi besar pula jumlah penerimaan pajak dari sektor tersebut. Perkembangan UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun yang semakin meningkat, memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya ekstensifikasi pajak. Namun, hal tersebut tidak mudah karena dimungkinkan adanya berbagai penafsiran dari Wajib Pajak UMKM dalam hal perpajakannya. Fakta di lapangan menunjukkan pertumbuhan UMKM tidak seiring dengan jumlah kenaikan penerimaan pajak (DJP, 2009). Tentu perlu dilakukan berbagai upaya dari semua pihak agar hal ini bisa tercapai.

Menurut UU KUP No. 28 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 1 bahwa secara garis besar, pajak dapat didefinisikan sebagai pungutan yang dipaksakan oleh

pemerintah kepada masyarakat guna mewujudkan cita-cita bersama yaitu kemakmuran masyarakat. Seseorang yang telah membayar kewajiban perpajakannya tidak mendapatkan imbalan secara langsung melainkan melalui perbaikan sarana dan prasarana publik.

Dari pengertian tersebut terlihat bagaimana pentingnya peran pajak. Walaupun telah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah seperti program *tax amnesty* dalam mendorong agar UMKM mau menyetorkan pajaknya, namun demikian pada kenyataannya penerimaan pajak dari sektor UMKM di Indonesia masih sangat rendah. Pada periode tahun 2015 hanya 397 ribu UMKM yang membayar surat pemberitahuan dari total seluruh UMKM yang ada

Sementara itu di Provinsi Sumatra Barat, memiliki jumlah UMKM yang cukup tinggi, berikut merupakan data jumlah UMKM di Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah			
		Usaha mikro (unit)	Usaha kecil (unit)	Usaha menengah (unit)	Total (unit)
1	Kab. Lima Puluh Kota	271	4973	43.679	48.923
2	Kab. Solok Selatan	40	913	8.952	9.905
3	Kab. Pasaman	69	3.121	25.351	28.541
4	Kab. Tanah Datar	285	5.772	37.556	43.613

5	Kab. Pasaman Barat	258	5.712	26.391	32.361
6	Kab. Pesisir Selatan	101	5.489	38.497	44.087
7	Kab. Solok	247	4.426	35.437	40.110
8	Kab. Padang Pariaman	292	4.574	37.474	42.340
9	Kab. Agam	301	4.635	42.561	47.497
10	Kab. Sijunjung	99	3.595	19.785	23.479
11	Kab. Dharmasraya	84	2.906	12.797	15.787
12	Kab. Kep. Mentawai	25	246	2.924	3.195
13	Kota Padang	950	39.403	35.883	76.236
14	Kota Sawahlunto	110	2.106	8.923	11.139
15	Kota Padang Panjang	105	2.549	6.769	9.423
16	Kota Bukittinggi	681	8.714	18.953	28.348
17	Kota Payakumbuh	396	4.954	13.895	19.245
18	Kota Solok	257	2.951	8.712	11.920
19	Kota Pariaman	305	2.623	9.401	12.329
Jumlah		4876	109.662	433.940	548.478

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatra Barat, tahun 2015

Berdasarkan pada tabel 1.1 memperlihatkan bahwa potensi penerimaan pajak dari sektor ini sangat tinggi dengan menunjukkan jumlah seluruh pertumbuhan UMKM di Provinsi Sumatra Barat mencapai 548.478 usaha pada tahun 2015. Tingginya jumlah UMKM di Sumatra Barat ternyata tidak diiringi dengan penerimaan pajak yang tinggi. Dari total jumlah wajib pajak yang mencapai 500 ribu orang namun yang membayar baru 10% atau sekitar 50.000 orang, serta sector penyumbang pajak terbesar di Sumatra barat berasal dari perkebunan dan

perusahaan yang besar seperti PT Semen Padang serta rekanan pemerintah daerah (DJP Sumbar Jambi).

Berdasarkan hal tersebut tentu menimbulkan pertanyaan, factor-faktor apa yang mempengaruhi UMKM di Sumatera Barat dalam menyetorkan pajaknya. Pertanyaan ini penting untuk dicarikan jawabannya, karena dengan mengetahui faktor-faktor penghambat ini maka usaha pemerintah untuk mencapai penerimaan pajak dari sektor UMKM bisa menjadi lebih ditingkatkan lagi.

Berdasarkan table 1.1 peneliti mengambil penelitian di Kabupaten Pesisir Selatan karena perkembangan UMKM di kota ini yang meningkat dari tahun ke tahun dan juga akses yang dekat dari tempat tinggal peneliti yang akan memudahkan dalam hal pencarian data nantinya.

Selain itu penelitian ini juga dianggap perlu untuk dilakukan, oleh karena masih banyak terdapat perbedaan pada penelitian sebelumnya. Hal ini tentunya akan dapat membatasi pemahaman kita mengenai pajak penghasilan oleh UMKM, terutama mengenai factor-faktor yang mempengaruhi UMKM dalam menyetorkan pajaknya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik mencoba untuk memberikan gambaran mengenai “*Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Membayar Pajak Penghasilan*”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sejauh mana kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan mulai dari masalah NPWP, pelaporan SPT, serta masalah tunggakan?
2. Mengetahui sejauh mana pemahaman wajib pajak UMKM mengenai perpajakan?
3. Mengetahui persepsi wajib pajak UMKM mengenai perpajakan?
4. Kendala yang dihadapi wajib pajak UMKM dalam melunasi kewajiban sebagai wajib pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan mulai dari masalah NPWP, pelaporan SPT, serta masalah tunggakan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman wajib pajak UMKM mengenai perpajakan.
3. Untuk mengetahui persepsi wajib pajak UMKM mengenai perpajakan.
4. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi wajib pajak UMKM dalam melunasi kewajiban sebagai wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bisa memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu:

1. Bagi UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi mengenai pajak dan manfaat yang akan diterimanya bagi UMKM yang ada di Pesisir Selatan.

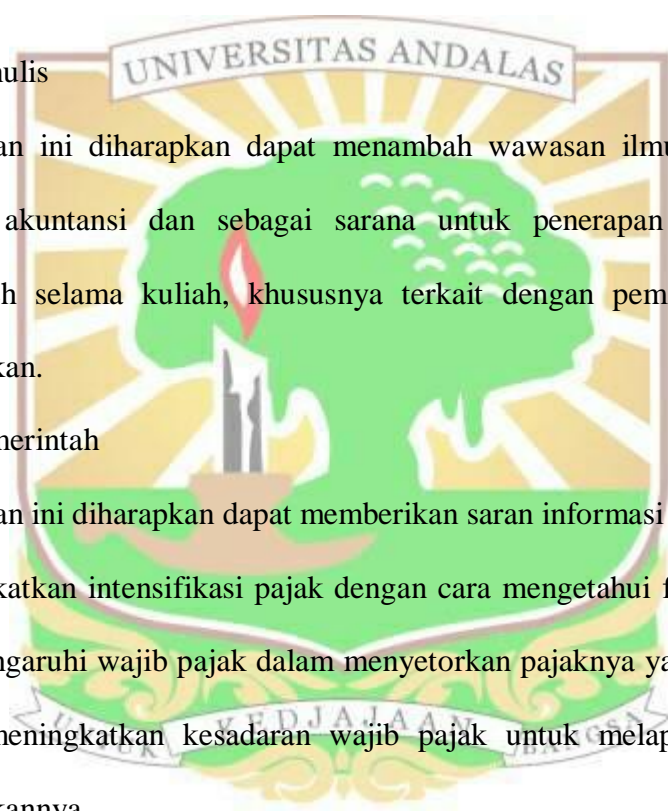
2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan sebagai sarana untuk penerapan teori-teori yang diperoleh selama kuliah, khususnya terkait dengan pemahaman dibidang perpajakan.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran informasi serta solusi dalam meningkatkan intensifikasi pajak dengan cara mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya.

4. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi dan tambahan literatur dalam membuat penelitian sejenis selanjutnya serta dapat memberikan gagasan, ide, dan pemikiran dalam upaya penerapan ilmu



1.5 Sistematika Penulisan

Bab satu adalah pendahuluan. Bab ini berisikan tentang gambaran secara menyeluruh tentang isi penelitian mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab dua adalah tinjauan pustaka yang menguraikan tentang konsep-konsep, teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian tentang penelitian terdahulu. Bab tiga adalah metodologi penelitian yang digunakan seperti sampel penelitian, instrument penelitian, metode pengumpulan data, model penelitian, dan metode analisis data. Bab empat adalah analisis data dan pembahasan. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data.

Bab lima adalah penutup yang menyajikan secara singkat mengenai kesimpulan dari hasil analisis penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang diperlukan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.

